



Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Penyampak dan Desa Tebing

Doni^{1*}, Saimi²

¹⁻²Program Pascasarjana, Institut Sains Dan Bisnis Atma Luhur, Pangkalpinang, Indonesia

Email: doni64@gmail.com¹, saimi447@gmail.com²

*Penulis Korespondensi: doni64@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the utilization of the Village Information System (SID) in improving public services in Penyampak Village and Tebing Village. The research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving village officials and community members. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles and Huberman, including data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that the utilization of SID has a positive impact on improving public services, particularly in terms of service speed, administrative efficiency, and structured data management. Penyampak Village demonstrates a more optimal level of utilization compared to Tebing Village. However, the implementation of SID has not been fully optimized due to several constraints, such as limited human resources, inadequate technological infrastructure, and low digital literacy among the community. This study concludes that the utilization of SID has the potential to enhance the quality of public services at the village level, although its success is highly dependent on the readiness of village officials, infrastructure support, and community participation.*

Keywords: *Digital Literacy; Public Services; Village Administration; Village Governance; Village Information System.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Penyampak dan Desa Tebing. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari aparatur desa dan masyarakat. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan SID memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelayanan publik, terutama dalam hal kecepatan pelayanan, efisiensi administrasi, dan pengelolaan data yang lebih terstruktur. Desa Penyampak menunjukkan tingkat pemanfaatan yang lebih optimal dibandingkan Desa Tebing. Namun demikian, implementasi SID belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang belum memadai, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan SID berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa, namun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kesiapan aparatur desa, dukungan infrastruktur, dan partisipasi masyarakat.

Kata kunci: Administrasi Desa; Literasi Digital; Pelayanan Publik; Sistem Informasi Desa; Tata Kelola Desa.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi di era digital saat ini telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi agar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu bentuk nyata dari transformasi tersebut adalah penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Transformasi digital tidak hanya terjadi pada tingkat pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga telah menjangkau hingga ke tingkat desa. Desa sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan pelayanan publik, seperti administrasi kependudukan, pengelolaan surat-menyurat, hingga penyampaian informasi pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan *good governance*. Dalam mendukung proses digitalisasi di desa, pemerintah mendorong penerapan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai sarana pengelolaan data dan pelayanan berbasis teknologi informasi. SID memungkinkan integrasi berbagai data, mulai dari data kependudukan, administrasi desa, hingga pelayanan publik dalam satu sistem yang terpadu. Dengan adanya SID, diharapkan berbagai permasalahan pelayanan publik yang sebelumnya masih dilakukan secara manual, cenderung lambat, kurang transparan, serta rawan kesalahan administrasi dapat diatasi.

Secara nasional, implementasi digitalisasi desa menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, terdapat 84.276 wilayah administrasi setingkat desa di Indonesia. Jumlah ini menunjukkan besarnya kebutuhan akan sistem informasi yang mampu mendukung tata kelola pemerintahan desa secara optimal. Selain itu, hasil kajian juga menunjukkan bahwa sekitar 45% desa di Indonesia telah menerapkan SID, dengan tingkat kepuasan masyarakat yang meningkat dari 65% menjadi 87% setelah adanya sistem digital. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan SID memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga terus berupaya mendorong penguatan digitalisasi desa, salah satunya melalui kebijakan terkait Sistem Informasi Desa. Implementasi SID juga terbukti mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, di mana waktu pelayanan administrasi yang sebelumnya membutuhkan beberapa hari dapat dipersingkat menjadi hanya dalam hitungan menit.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, penerapan SID di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, rendahnya tingkat literasi digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta masih kuatnya budaya kerja manual. Hal-hal tersebut menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi pemanfaatan sistem, sehingga belum semua desa mampu mengimplementasikan SID secara maksimal.

Fenomena tersebut juga ditemukan di Desa Penyampak dan Desa Tebing. Meskipun kedua desa tersebut telah mulai menerapkan SID, namun pemanfaatannya masih belum optimal. Beberapa permasalahan yang terjadi antara lain masih adanya pelayanan yang dilakukan secara manual, keterlambatan dalam pengelolaan data, serta keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan sistem. Selain itu, tingkat penggunaan layanan digital oleh masyarakat juga masih tergolong rendah akibat keterbatasan literasi digital.

Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara harapan ideal dalam penerapan SID dengan kondisi nyata di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan Sistem Informasi Desa terhadap peningkatan pelayanan publik di Desa Penyampak dan Desa Tebing. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam mengukur efektivitas SID serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

2. KAJIAN TEORITIS

Sistem Informasi Desa (SID)

Sistem Informasi Desa (SID) adalah sebuah sistem yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola administrasi desa, data kependudukan, serta pelayanan publik secara terintegrasi. Keberadaan SID menjadi bagian dari upaya transformasi digital di tingkat pemerintahan desa guna mendukung terciptanya tata kelola yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

Menurut (Sutabri, 2012), sistem informasi merupakan suatu sistem dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, serta menyediakan laporan yang diperlukan oleh pihak manajemen. Dengan demikian, SID tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai sarana pendukung perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat desa.

Menurut (Jogiyanto, 2017), sistem informasi dapat diartikan sebagai suatu kombinasi antara teknologi, prosedur kerja, sumber daya manusia, dan data yang saling terintegrasi untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam mendukung proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Dalam konteks pemerintahan desa, Sistem Informasi Desa (SID) berperan sebagai media berbasis digital yang membantu aparatur desa dalam meningkatkan efektivitas serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, berbagai penelitian terkait transformasi digital dalam pelayanan publik menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi digital memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan segala bentuk layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan administratif, jasa, maupun kebutuhan publik lainnya. Pelayanan publik menurut (Ratminto & Winarsih, 2007) juga dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut (Pasolong, 2007) pelayanan publik didefinisikan sebagai aktifitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Menurut (Sinambela & Sinambela, 2019), pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien, serta mampu memberikan kepuasan bagi penerima layanan. Sementara itu (Dwiyanto, 2021) menyatakan bahwa kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh kemampuan birokrasi dalam memberikan layanan yang responsif, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan era digital, pelayanan publik tidak hanya dituntut untuk cepat, tetapi juga harus mampu memberikan kemudahan akses informasi serta menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memanfaatkan teknologi secara optimal.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik merupakan salah satu bentuk implementasi *e-government* yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sekaligus kualitas pelayanan pemerintahan. Menurut (Eko, 2016), penerapan *e-government* memungkinkan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif melalui penggunaan teknologi digital, integrasi data, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Sejalan dengan itu (Heeks, 2006) menyatakan bahwa teknologi informasi dalam sektor publik berperan penting dalam memperbaiki sistem administrasi pemerintahan serta meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pemanfaatan teknologi ini memungkinkan terjadinya transformasi birokrasi dari yang semula bersifat manual menjadi digital, sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap

kebutuhan masyarakat. (Venkatesh et al., 2003) dalam model *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) menambahkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi juga dipengaruhi oleh faktor ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan kondisi pendukung. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi teknologi dalam pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh teknologi itu sendiri, tetapi juga oleh lingkungan sosial dan kesiapan organisasi.

Sejumlah penelitian terbaru terkait digitalisasi pelayanan publik juga menunjukkan bahwa transformasi digital mampu memberikan berbagai manfaat, antara lain meningkatkan efisiensi pelayanan, memperluas aksesibilitas layanan, mendorong transparansi pemerintahan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan publik.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, pemanfaatan teknologi informasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya tingkat literasi digital, serta belum optimalnya kesiapan sumber daya manusia.

Kinerja Pelayanan Publik

Kinerja pelayanan publik dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan pemerintah dalam memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Menurut (Dwiyanto, 2021), kinerja pelayanan publik dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu kualitas pelayanan, responsivitas aparatur, akuntabilitas, efektivitas pelayanan, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Selanjutnya, menurut (Mahmudi, 2010), kinerja pelayanan publik merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam mewujudkan tujuan organisasi. Kinerja ini diukur berdasarkan indikator efisiensi, efektivitas, ekonomi, dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Menurut (Sinambela, 2012), kinerja pelayanan publik erat kaitannya dengan kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan memuaskan masyarakat. Pelayanan yang berkinerja baik adalah pelayanan yang mampu memenuhi harapan masyarakat serta memberikan nilai tambah dalam bentuk kemudahan, kenyamanan, dan kepastian layanan.

Dalam konteks digitalisasi pelayanan di tingkat desa, kinerja pelayanan publik tidak hanya dilihat dari hasil akhir pelayanan, tetapi juga dari kemampuan aparatur desa dalam memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hubungan Pemanfaatan SID dengan Pelayanan Publik

Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) memiliki keterkaitan yang kuat dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya SID, proses administrasi desa dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan terintegrasi dibandingkan dengan sistem manual yang sebelumnya digunakan.

Berbagai penelitian terbaru terkait transformasi digital dalam pelayanan publik menunjukkan bahwa penerapan sistem berbasis digital dalam pemerintahan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat akses terhadap informasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa.

Namun demikian, keberhasilan implementasi SID sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, di antaranya kompetensi aparatur desa, kesiapan infrastruktur teknologi, serta tingkat literasi digital masyarakat.

Dengan demikian, pemanfaatan SID dalam pelayanan publik tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi semata, tetapi juga berkaitan erat dengan kesiapan organisasi pemerintahan desa dan masyarakat dalam menghadapi proses transformasi digital.

Penelitian Terdahulu dan Kesenjangan Penelitian

Berdasarkan hasil telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu terkait implementasi Sistem Informasi Desa (SID), dapat diketahui bahwa sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek efektivitas serta penerapan teknis dalam pelayanan publik di tingkat desa. Penelitian yang dilakukan oleh (Apriyansyah et al., 2018) menunjukkan bahwa penerapan SID di Desa Dlingo mampu meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada capaian *output* pelayanan, tanpa mengkaji secara mendalam aspek internal seperti kualitas sumber daya manusia, kesiapan organisasi, serta keberlanjutan pemanfaatan sistem dalam jangka panjang.

Selanjutnya, penelitian (Setyawan et al., 2022) mengungkapkan bahwa implementasi SID di Desa Wonokerto belum berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya dukungan pendampingan teknis. Meskipun demikian, penelitian ini masih berfokus pada identifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi SID dengan pendekatan deskriptif, sehingga belum mengkaji secara komprehensif dampak penggunaan SID terhadap kualitas pelayanan publik yang terukur.

Di sisi lain, penelitian (Mardinata et al., 2023) menyatakan bahwa pengembangan Sistem Informasi Desa berkontribusi dalam meningkatkan akses informasi, transparansi, serta partisipasi masyarakat dalam tata kelola desa. Namun, kajian tersebut lebih berorientasi pada

kegiatan pengabdian masyarakat dan implementasi sistem, sehingga belum membahas secara empiris hubungan kausal antara pemanfaatan SID dengan variabel strategis, seperti efektivitas pelayanan, tingkat kepuasan masyarakat, maupun kinerja organisasi.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, dapat diidentifikasi adanya *research gap* yang cukup jelas. Pertama, masih terbatas penelitian yang mengintegrasikan aspek teknologi, sumber daya manusia, dan kualitas pelayanan publik dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Kedua, dominasi pendekatan kualitatif deskriptif menyebabkan masih minimnya penelitian yang menguji hubungan antar variabel secara kuantitatif maupun melalui model kausalitas. Ketiga, kajian mengenai dampak pemanfaatan SID terhadap *outcome* yang lebih luas, seperti kepuasan masyarakat dan kinerja organisasi pemerintah desa, masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan menjadi penting dan relevan untuk mengisi kesenjangan tersebut, khususnya dengan menganalisis secara lebih mendalam hubungan antara pemanfaatan Sistem Informasi Desa dengan efektivitas pelayanan publik serta implikasinya terhadap kinerja organisasi dan kepuasan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan *e-government* di tingkat desa.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Penyampak dan Desa Tebing. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara alami berdasarkan pengalaman dan persepsi aparatur desa serta masyarakat sebagai penerima layanan. Menurut (Sugiyono, 2022), penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data yang dilakukan melalui berbagai teknik secara triangulasi.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang melibatkan kepala desa, perangkat desa, operator SID, serta masyarakat sebagai pengguna layanan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi guna memperoleh informasi yang komprehensif terkait proses pelayanan serta pemanfaatan SID.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh (Miles & Huberman, 2014), yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Sementara itu, keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber,

triangulasi teknik, dan triangulasi waktu, serta dilakukan *member check* untuk memastikan validitas data yang diperoleh.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Penyampak dan Desa Tebing, diperoleh gambaran bahwa Sistem Informasi Desa (SID) telah dimanfaatkan sebagai alat pendukung dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya pada layanan administrasi seperti pembuatan surat keterangan, pengelolaan data kependudukan, serta penyimpanan arsip desa. Pemanfaatan SID di kedua desa tersebut menunjukkan adanya perubahan dari sistem pelayanan yang sebelumnya bersifat manual menjadi lebih terkomputerisasi.

Di Desa Penyampak, pemanfaatan SID dapat dikatakan lebih optimal dibandingkan dengan Desa Tebing. Aparatur desa telah memanfaatkan sistem untuk pembuatan surat secara otomatis sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, pengelolaan data kependudukan menjadi lebih terstruktur, sehingga memudahkan dalam proses pencarian dan pengolahan data. Meskipun demikian, pemanfaatan fitur-fitur lanjutan dalam sistem masih belum sepenuhnya dimaksimalkan.

Sementara itu, di Desa Tebing, penggunaan SID masih belum berjalan secara optimal. Beberapa proses pelayanan masih dilakukan secara manual, terutama ketika terjadi kendala teknis seperti gangguan jaringan internet maupun keterbatasan kemampuan operator dalam mengoperasikan sistem. Kondisi ini menyebabkan pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya efektif dan efisien.

Dari perspektif masyarakat, sebagian besar responden menyatakan bahwa penggunaan SID memberikan kemudahan dalam proses pelayanan, khususnya dalam hal kecepatan dan kejelasan prosedur. Namun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami penggunaan layanan berbasis digital, sehingga lebih memilih menggunakan layanan secara langsung atau konvensional.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) memiliki peranan yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Temuan ini sejalan dengan pendapat (Eko, 2016) yang menyatakan bahwa penerapan teknologi informasi dalam pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan serta mempercepat akses informasi bagi masyarakat.

Pemanfaatan SID di Desa Penyampak terbukti mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik, yang ditunjukkan melalui percepatan waktu pelayanan, kemudahan dalam pengelolaan data, serta meningkatnya akurasi informasi yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dapat mendorong perbaikan dalam tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam pelayanan administrasi.

Namun demikian, hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi SID tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem itu sendiri, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Hal ini sejalan dengan pendapat (Jogiyanto, 2017) yang menyatakan bahwa keberhasilan sistem informasi bergantung pada keterpaduan antara aspek teknologi, manusia, dan organisasi.

Di Desa Tebing, keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan sistem serta kendala jaringan internet menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi pemanfaatan SID. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses transformasi digital di tingkat desa masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kesiapan sumber daya manusia dan ketersediaan infrastruktur teknologi.

Selain itu, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pemanfaatan SID dalam pelayanan publik. Masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan berbasis digital cenderung tetap memilih pelayanan secara konvensional. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi SID tidak hanya bergantung pada aparatur desa, tetapi juga pada kesiapan masyarakat dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Dengan demikian, pemanfaatan SID dalam meningkatkan pelayanan publik dapat dikatakan telah memberikan dampak positif, namun masih belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi, serta sosialisasi kepada masyarakat agar pemanfaatan SID dapat lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pemanfaatan Sistem Informasi Desa merupakan langkah strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Namun, keberhasilan implementasinya sangat ditentukan oleh sinergi antara teknologi, aparatur desa, dan masyarakat sebagai pengguna layanan

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Penyampak dan Desa Tebing memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pelayanan publik, terutama dalam aspek kecepatan pelayanan, kemudahan pengelolaan data, serta efisiensi administrasi. Penerapan SID mampu mengubah sistem pelayanan yang sebelumnya bersifat manual menjadi lebih terstruktur dan berbasis teknologi.

Namun demikian, tingkat pemanfaatan SID di kedua desa tersebut masih belum optimal. Desa Penyampak menunjukkan tingkat pemanfaatan yang lebih baik dibandingkan Desa Tebing, yang masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kompetensi aparatur desa, gangguan infrastruktur jaringan, serta masih adanya praktik pelayanan secara manual. Selain itu, rendahnya literasi digital masyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan SID dalam pelayanan publik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan SID memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Akan tetapi, keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur teknologi, serta kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan berbasis digital.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, pemerintah desa perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya aparatur desa, melalui pelatihan dan pendampingan terkait pengoperasian Sistem Informasi Desa (SID) agar pemanfaatannya dapat dilakukan secara optimal.

Kedua, diperlukan upaya peningkatan infrastruktur teknologi, terutama dalam hal ketersediaan dan kestabilan jaringan internet, guna mendukung kelancaran penggunaan sistem dalam pelayanan publik. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, implementasi SID tidak akan berjalan secara maksimal.

Ketiga, pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan layanan berbasis digital, sehingga masyarakat dapat memahami manfaat SID dan mampu memanfaatkannya secara mandiri.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan pengembangan penelitian dengan menggunakan pendekatan yang berbeda atau menambahkan variabel lain, seperti kepuasan masyarakat maupun kinerja aparatur desa, sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat lebih komprehensif dan mendalam.

DAFTAR REFERENSI

- Dwiyanto, A. (2021). Reformasi birokrasi publik di Indonesia. UGM Press.
- Apriyansyah, Maullidina, I., & Purnomo, E. P. (2018). Efektivitas sistem informasi desa (SID) dalam pelayanan publik di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 4(1). <https://doi.org/10.31947/jakpp.v4i1.5901>
- Mardinata, E., Cahyono, T. D., & Rizqi, R. M. (2023). Transformasi digital desa melalui sistem informasi desa (SID): Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. *PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1). <https://doi.org/10.38043/parta.v4i1.4402>
- Heeks, R. (2006). Implementing and managing e-government. Sage.
- Indrajit, R. E. (2016). Electronic government. ANDI.
- Jogiyanto, H. M. (2017). Analisis dan desain sistem informasi: Pendekatan terstruktur teori dan praktik aplikasi bisnis. Penerbit Andi.
- Sinambela, L. P., & Sinambela, S. (2019). Manajemen kinerja: Pengelolaan, pengukuran, dan implikasi kinerja. PT Rajagrafindo Persada.
- Mahmudi. (2010). Manajemen kinerja sektor publik. UPP STIM YKPN.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). Analisis data kualitatif (T. Rohidi, Trans.). UI Press.
- Pasolong, H. (2007). Teori administrasi publik. Alfabeta.
- Ratminto, & Winarsih, A. S. (2007). Manajemen pelayanan (Vol. 5). Pustaka Pelajar.
- Setyawan, A., Rochim, A. I., & Kusbandrijo, B. (2022). Penggunaan sistem informasi desa dalam pelayanan publik di Pemerintah Desa Wonokerto Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 2(2). <https://www.wonokerto-tekung.lumajangkab.go.id>
- Sinambela, L. P. (2012). Kinerja pegawai: Teori, pengukuran, dan implementasi. Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sutabri, T. (2012). Analisis sistem informasi. Andi.
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478. <https://doi.org/10.2307/30036540>